



SCAN ME

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

lentera.tv

@lenteratoday

Lentera TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



# DIDUGA TAHANAN 'MAIN' KE RUANGAN PIMPINAN KPK

**K**abar kurang sedap datang dari Gedung Merah Putih. Jumat 28 Juli 2023, seorang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga naik ke lantai 15 Gedung Merah Putih. Lantai tersebut merupakan lokasi ruangan kerja lima pimpinan KPK dan satu aula untuk rapat ekspose perkara. Mengejutkannya, tahanan ini diduga berada di area tersebut tanpa rompi tahanan berwarna oranye dan tangan pun tak terborgol. Lazimnya seorang tersangka. Menurut informasi yang santer beredar, tahanan ini berada sekitar 30 menit di lantai tersebut. Diduga, tahanan ini adalah Dadan Tri Yudianto. Ia adalah salah satu tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengakui telah menerima laporan soal itu dan sedang memprosesnya. Siapa yang ditemui? Meski belum benderang terungkap, tapi faktanya si tahanan 'main' terlalu jauh. Sebab, seharusnya seorang tersangka atau saksi hanya berada di lantai 2 saja.

(Baca Hal 11)

**Government (Hal 2)**  
**Pemerintah Seriusi**  
**Perubahan**  
**Sistem Gaji PNS :**  
**Single Salary Uji**  
**Coba di PPAK**  
**& KPK**



**KETUA KPK,**  
**FIRLU BAHURI**

**RP 20,7 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 10,4 M**

Alat Transportasi  
dan mesin  
**RP 930 JT**

Kas Setara Kas  
**RP 9,3 M**



**WAKIL**  
**KETUA KPK,**  
**NURUL**  
**GHUFRON**

**RP 15,4 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 13,8 M**

Alat Transportasi  
dan mesin  
**RP 297 JT**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 162,7 JT**



Kas Setara Kas  
**RP 1,4 M**



Surat Berharga  
**RP 500 JT**



Harta Lainnya  
**RP 16,5 M**



Hutang  
**RP 1,05 M**



**WAKIL**  
**KETUA KPK,**  
**ALEXANDER**  
**MARWATA**

**RP 9,2 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 3,5 M**

Alat Transportasi  
dan mesin  
**RP 432 JT**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 172,5 JT**

Kas Setara Kas  
**RP 3,09 M**



Surat Berharga  
**RP 2,01 M**



**WAKIL**  
**KETUA KPK,**  
**JOHANIS**  
**TANAK**

**RP 8,9 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 4,5 M**

Alat Transportasi  
dan mesin  
**RP 239 JT**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 55 JT**

Kas Setara Kas  
**RP 3,8 M**

Surat Berharga  
**RP 200 JT**



**WAKIL**  
**KETUA KPK,**  
**NAWAWI**  
**POMOLANGO**

**RP 3,4 M**

Tanah dan Bangunan  
**RP 1,8 M**

Alat Transportasi  
dan mesin  
**RP 557,5 JT**

Harta Bergerak Lainnya  
**RP 125 JT**

Kas Setara Kas  
**RP 731,6 JT**

Harta Lainnya  
**RP 330 JT**

Hutang  
**RP 150 JT**

**HARTA PARA**  
**PIMPINAN KPK**

# Pemerintah Seriusi Perubahan Sistem Gaji PNS

## Single Salary Uji Coba di PPATK & KPK

**JAKARTA** - Pemerintah tampak serius dengan rencana perubahan sistem penggajian aparatur sipil negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan skema single salary yang akan diterapkan pemerintah ke depan tak akan membuat pegawai yang rajin merugi.

Diketahui, pemerintah tengah saat ini menguji coba penerapan skema single salary atau gaji tunggal di dua instansi. Dua instansi itu ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Soal single salary ini kita masih pilot project di PPATK dan di KPK, masih pilot project di situ, nanti kita evaluasi," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Menurut Anas, single salary itu nantinya akan diatur khusus dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP. Besaran gajinya hanya akan memuat satu komponen, sehingga menghapus komponen lain yang selama ini terpisah seperti tunjangan perjalanan dinas dan lain-lainnya.

"Nanti akan diatur oleh PP, tapi ini kan misal tidak ada perjalanan dinas, a, b, c, d, honor-honor, tapi bagi mereka yang ingin bekerja, dengan yang tidak kerja merasa bagaimana, merasa tidak dapat keadilan, yang kerja dapat sama dengan yang enggak kerja, ini yang sedang di pilot project," tuturnya.

Anas menjelaskan, PPATK dan KPK dipilih sebagai tempat ujicoba karena dua instansi itu paling bersinggungan dengan integritas. "KPK kan ada banyak pekerjaan yang membutuhkan dukungan kinerja bagus, begitu juga integritas dan lain-lain," ungkap Anas.

Wacana penerapan single salary pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2019 silam. Lalu dilanjutkan Menteri



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas

PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mendukung integritas ASN demi menggapai cita-cita Indonesia menjadi Negara Maju pada 2045.

Dikutip dari Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji dan Tunjangan pada 2017, disebutkan single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa tengah mengkaji sistem Single salary atau gaji tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu alasannya yakni karena banyak negara lain yang sudah menerapkan sistem penggajian seperti ini.

"Negara-negara lain sudah banyak

(menerapkan single salary). Benchmark kita kan, ke sana," katanya usai peluncuran Kampanye SDG's Kolaborasi Kementerian PPN/ Bappenas dengan MRT Jakarta, Selasa (12/9/23).

Dengan skema ini, PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan, yakni mulai dari unsur jabatan yakni gaji dan tunjangan seperti kinerja dan kemahalan. "Single salary itu juga termasuk misalnya bagian dari asuransinya, kesehatan, kematian, hari tua, itu semua jadi satu dalam perhitungan seperti itu (single salary)," kata Suharso.

Langkah kebijakan ini bukan hal baru. Pada 2014, sederet eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan skema gaji tunggal bagi para abdi negara. Mereka yakin skema itu bisa meringankan beban anggaran negara yang digunakan untuk membayar gaji PNS

### Termasuk Tukin, Perdin & Honor

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan) dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan PNS yang punya jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

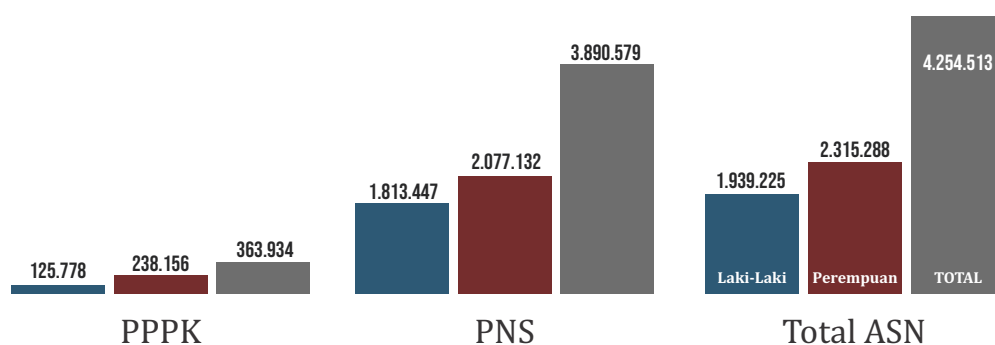
Policy brief itu juga menyebutkan tunjangan kinerja akan tetap dimuat dalam single salary dan diberikan sesuai capaian kinerja PNS yang berfungsi sebagai penambahan bagi penghasilan atau pengurang penghasilan.

Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan, apabila capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik. Tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan apabila output kerjanya kurang atau buruk.

Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji PNS yang penerapannya sama di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam tunjangan kinerja, dimungkinkan PNS yang mempunyai kontrak kinerja jabatan yang sama bisa dapatkan tunjangan kinerja ber-beda, tergantung pada hasil capaian kerjanya.

Sedangkan untuk pemberian tunjangan kemahalan akan dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja. (wid,rls,ist/dya)

## JUMLAH PEGAWAI ASN DI INDONESIA (31 DESEMBER 2022)



## PERKEMBANGAN JUMLAH PNS DI INDONESIA (2017-2022)

TAHUN	PUSAT	DAERAH	TOTAL
2022	2.946.404	944.175	3.890.579
2021	3.058.775	936.859	3.995.634
2020	3.209.199	958.919	4.168.118
2019	3.235.390	953.731	4.189.121
2018	3.246.267	939.236	4.185.503
2017	3.364.148	925.248	4.289.396

# DPR Restui Pagu 2024 KPU Rp 28 T, Bawaslu Rp 11 T



Sosialisasi Pemilu 2024 di kalangan pemilih pemula dilakukan dengan menyesuaikan era digitalisasi. (ilustrasi.dok)

**JAKARTA** - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar Rp 28 triliun. Para wakil rakyat juga sepakat pagu anggaran Bawaslu RI di 2024 senilai Rp 11 triliun.

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KPU RI tahun 2024 sebesar Rp28.365.496.586.000 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp 33.396.873.000. Dengan demikian pagu alokasi anggaran KPU RI tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459.000,00," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Gedung MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Saan lalu memerinci anggaran KPU RI per programnya. Program tersebut terbagi dari dukungan manajemen dan penyelenggaraan pemilu.

"Dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.111.863.231.000 dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 26.287.030.228.000," paparnya.

Selanjutnya, Saan memaparkan persetujuan pagu anggaran Bawaslu RI. Total anggaran pagi yang disetujui sebesar Rp11.611.620.116.000.

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Bawaslu RI tahun 2024 sebesar Rp 11.605.527.974.000 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp6.092.142.000. Dengan demikian

pagu alokasi anggaran Bawaslu RI tahun 2024 menjadi sebesar Rp11.611.620.116.000," katanya.

Saan turut memerinci anggaran Bawaslu RI per programnya. Serupa dengan KPU RI, program tersebut terbagi dari dukungan manajemen dan penyelenggaraan pemilu.

"Dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut. Program Dukungan Manajemen Rp 1.368.710.388.000, dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 10.242.909.728.000," ujar dia.

Lebih lanjut, Saan menyampaikan pihaknya menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar Rp1.418.643.553.000.

"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu RI tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," tutur Saan.

## Wajib Laporan Sumbangan Kampanye

Di sisi lain, peserta Pemilu 2024 tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

Sebelumnya, KPU berencana untuk menghapus LPSDK. Kendati demikian, wacana itu menuai penolakan dari berbagai pihak. "Jadi apa yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 22 itu akan diberlakukan kepada para peserta Pemilu," kata

Ketua Divisi KPU Idham Holik dikutip Selasa (12/9/2023).

Idham mengatakan, LPSDK yang kembali diwajibkan ini merupakan buah dari masukan-masukan publik yang diterima KPU. "Karena kemarin banyak masukan dari publik, saya pikir masukan-masukan itu sebenarnya enggak ada yang bertentangan sama sekali dengan rancangan legal draft kami. Jadi pada akhirnya, kami pertegas di dalam KPU tentang dana kampanye," katanya.

"Dan ini membuktikan bahwa KPU dalam proses legal drafting menggunakan pendekatan deleberatif," lanjutnya menambahkan.

LPSDK dilakukan mulai 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024, sesuai yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Menurut Idham, KPU sejak awal tidak berniat untuk menghapus LPSDK melainkan mengubah formatnya. "Dahulu pun sebetulnya LPSDK itu enggak dihapus. Cuma emang LPSDK formatnya kita ubah dari rentang waktu menjadi harian," tutur dia.

Dia menjelaskan, format baru berupa harian tersebut nantinya mewajibkan peserta Pemilu untuk melaporkan dana sumbangan secara real-time. "Jadi kalau hari ini peserta Pemilu menerima sumbangan, maka hari itu atau esok wajib diunggah ke dalam sistem informasi dana kampanye (Sidakam)," ujarnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 itu, disebutkan laporan dana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden itu terdiri dari tiga. Yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan

Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Adapun LPSDK adalah instrumen yang terdiri dari informasi identitas pemberi beserta jumlah sumbangan dana kampanye yang diterima peserta Pemilu. Pemberi dana kampanye itu bisa berupa perseorangan, perusahaan maupun badan usaha nonpemerintah.

LPSDK dinilai sebagai salah satu laporan yang krusial untuk disampaikan. Sebab jika tidak, maka tidak ada transparansi terkait dana kampanye. Kebijakan terkait LPSDK tidak hanya berlaku untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tapi juga wajib bagi calon legislatif (caleg) DPR dan DPD. (wid,rls,ist/dya)

## DANA KAMPANYE DI PEMILU 2024

### PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

Perseorangan  
MAKS RP 2.5 MILIAR

Perusahaan atau Badan Usaha  
MAKS RP 25 MILIAR

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Perseorangan  
MAKS RP 2.5 MILIAR

Perusahaan atau Badan Usaha  
MAKS RP 25 MILIAR

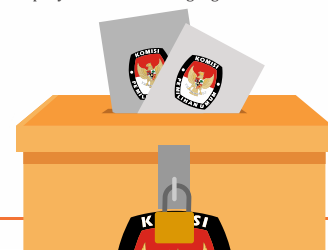
### DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Perseorangan  
MAKS RP 750 JUTA

Perusahaan atau Badan Usaha  
MAKS RP 1.5 MILIAR

### KET

- Sumbangan da kampanye dapat berbentuk uang, barang, dan jasa
- Jika sumbangan melebihi ketentuan ,maka dana kampanye tersebut dilarang digunakan



# Darurat Harga Beras, Jokowi Beri Sinyal Impor Lagi

**SURABAYA-** UNESCO secara resmi mengukuhkan Geopark Ijen Jawa Timur Indonesia sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dalam konferensi internasional ke-10 UGGp yang dilaksanakan di Marrakech, Maroko, Sabtu (9/9/2023).

Pengukuhan tersebut dilakukan dengan penyerahan sertifikat Geopark Ijen sebagai Global Geopark Network Institutional Member for period 2023-2026 kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kegiatan tersebut Gubernur Khofifah diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Dr Hudiono didampingi Kadis ESDM Provinsi Jawa Timur, Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso.

Atas diakuinya Geopark Ijen UGGp sebagai taman bumi dunia, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat Banyuwangi dan Bondowoso yang telah menjaga kelestarian Ijen.

"Alhamdulillah, Geopark Ijen berhasil menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp). Terima kasih kepada semua pihak yang telah peduli dan menjaga kelestarian alam di Ijen. Capaian ini buah kerja keras mereka semua," kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (11/9/2023).

"Dengan dikukuhkannya Geopark Ijen sebagai UNESCO Global Park, maka akan semakin membawa kekayaan alam Jatim mendunia. Kami optimis dengan pengukuhan ini wisatawan dari berbagai penjuru dunia akan berbondong-bondong datang ke Ijen," tambahnya.

Gubernur Khofifah mengatakan bagi Jatim, Ijen UGGp tidak hanya sekadar wisata, lebih dari itu, Ijen merupakan salah satu kekayaan alam



Presiden Jokowi meninjau aktivitas perdagangan dan memberikan bantuan pangan beras di Pasar Kranggot, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (12/9/2023). Foto: BPMI Setpres

bagi masyarakat Jatim, bahkan Indonesia.

Terletak di Provinsi Jawa Timur dan berada dalam dua wilayah kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Ijen UGGp memiliki international outstanding value berupa keberadaan Bluefire dan Danau Terasam di dunia.

Didukung potensi keindahan sisa letusan Geologi, keberadaan flora fauna endemik, dan budaya lokal, Ijen UGGp selalu dapat menyerap banyak wisatawan setiap tahunnya.

Meski memiliki banyak keunggulan, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa tak mudah untuk bisa meloloskan Ijen dalam UGGp. Terutama karena UGGp memiliki kriteria ketat yang harus dipenuhi dalam mengelola sumber daya geologi dan nilai budaya.

"Boleh dibilang bahwa penetapan

Ijen UGGp ini menempuh perjuangan panjang. Proses pengajuan ini kita mulai sejak penyampaian Letter of Intent (LOI) ke sekretariat UGGp melalui keputusan komite nasional geopark indonesia (KNGI) pada 30 Juli 2020 lalu," tegasnya.

Dalam mendukung keberadaan Geopark di Jawa Timur, Gubernur Khofifah juga membentuk Forum Geopark Jawa Timur lewat keputusan Gubernur Jatim No. 188/143/KPTS/013/2023 tentang Forum Geopark di Jatim.

Melalui forum itu, semua pemangku kepentingan bertukar pengalaman untuk proses pengajuan dan penilaian global geopark. Mulai dari penyusunan rencana pengembangan hingga evaluasi terhadap kegiatan pengembangan geopark.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 188/144/KPTS/013/2023

tentang Pengelola Geopark Ijen periode Tahun 2023-2024. "Ada pula pula Geopark Youth Forum sebagai mitra dari Badan Pengelola Geopark. Tujuannya adalah agar semakin banyaknya kaum muda yang lebih peduli terhadap lingkungan dan perkembangan perekonomian kreatif di daerah asalnya," terangnya.

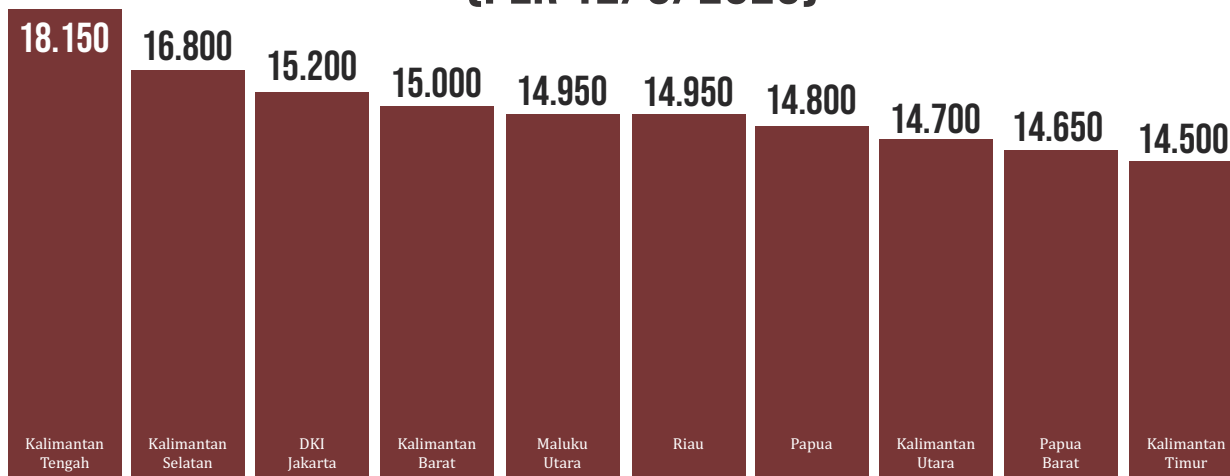
Kemudian, tahun lalu dalam proses assessment, Geopark Ijen memperoleh nilai tertinggi dengan skor 873. Hingga saat ini capaian skor tersebut masih merupakan capaian tertinggi diantara aspiring UNESCO Global Geopark di Indonesia yaitu Geopark Belitung dengan nilai skor 850, maupun Geopark Maros Pangkep dengan nilai skor 869.

Dengan ditetapkannya Geopark Ijen sebagai UGGp, Gubernur Khofifah berharap daya tarik wisata Gunung Ijen akan terdongkrak. Terutama untuk wisatawan mancanegara yang pada akhirnya juga berdampak pada perekonomian warga setempat dan Jawa Timur pada umumnya.

Saat ini di Provinsi Jawa Timur ada dua geopark berstatus UGGp yakni Gunungsewu dan Ijen. Satu geopark berstatus Nasional (Geopark Bojonegoro), dan beberapa berstatus aspiring untuk diajukan tingkat Nasional.

Beberapa geopark yang berstatus aspiring untuk diajukan ke tingkat Nasional tersebut ialah Bromo Tengger Semeru (BTS) meliputi Kab Malang, Kab Pasuruan, Kab Probolinggo, dan Kab Lumajang Bumi Manusia Wajak (Wajakensis) di Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek, dan Karst di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar. Kemudian ada Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Geopark Kabupaten Magetan, dan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. (ADV)

## PROVINSI DENGAN HARGA BERAS TERTINGGI (PER 12/9/2023)



## PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS IMPOR BULOG TAHUN 2023 (PER 9 SEPTEMBER-MENGUTIP PAPARAN EPI SULANDRI):

### IMPOR (PENUGASAN 2 JUTA TON)

**1) realisasi bongkar:**  
tahap I: 502.798 ton  
tahap II: 298.387 ton  
tahap III: 138.054 ton

**2) sedang bongkar:**  
tahap III: 55.352 ton

**3) rencana kedatangan:**  
dalam perjalanan: 31.140 ton (tahap III)

● proses muat: 13.700 ton (tahap III)  
12.300 ton (tahap IV)

● proses packing: 27.650 ton (tahap III)  
87.200 ton (tahap IV).

# Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Nilai Pemikiran Sekdaprov Kurang Tepat

**SURABAYA** – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menilai bahwa Pemandangan Umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (12/9/2023).

Pernyataan fraksi Partai Gerindra ini disampaikan dalam Pemandangan Umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (12/9/2023).

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa nota keuangan dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim terkait dengan Rancangan Perda Perubahan APBD 2023 layak dilanjutkan untuk dilakukan pembahasan di komisi-komisi. Sebab, tidak ada perbedaan antara Rancangan Perubahan KUA PPAS P-APBD 2023 dengan Nota Keuangan Rancangan Perda Perubahan APBD 2023.

Dia mengakui memang sempat ada perbedaan penafsiran antara Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam memahami postur anggaran. "Adanya selisih belanja antara kesepakatan Rancangan Perubahan KUA PPAS P-APBD 2023 dengan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2023 karena pada saat Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2023 terjadi pergeseran anggaran yang awalnya berada pada Pos Pembiayaan, digeser ke pos belanja. Dengan begitu, nota dan pendapat Banggar layak dilanjutkan untuk dibahas ke Komisi," kata Adhy di Surabaya, Senin (11/9/2023).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ada selisih belanja antara kesepakatan Rancangan Perubahan KUA PPAS P-APBD 2023 sebesar Rp 34,78 triliun dengan Nota Keuangan Rancangan Perda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 35,23 triliun. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 446,86 miliar.

Adhy menjelaskan bahwa selisih tersebut disebabkan karena pada saat Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2023 terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp 446,86 miliar. Di mana anggaran ini awalnya pada saat kesepakatan Rancangan Perubahan KUA-PPAS P-APBD 2023 berada pada Pos Pembiayaan.

Dengan rincian, untuk penyertaan modal PT BPR Jatim sebesar Rp 200 miliar, PT Askrida sebesar Rp 46,86 miliar, dan pencairan Dana Cadangan untuk Pemilukada sebesar Rp 200 miliar digeser ke Pos Belanja.

"Pergeseran ini disebabkan karena mengikuti ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 78 disebutkan bahwa penyertaan modal dapat dilaksanakan bila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan," katanya.

"Mengingat Perda dimaksud sampai dengan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perda P-APBD 2023 belum ditetapkan, maka penyertaan modal sebagaimana direncanakan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS P-APBD 2023 tidak dapat dilakukan. Sehingga dilakukan pergeseran ke pos Belanja Daerah," lanjutnya.

Dia juga menambahkan bahwa ada peraturan lainnya yakni pencairan dana cadangan melaksanakan SE Kemendagri tanggal 24 Januari 2023 Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dimana, pada angka 5 dinyatakan bahwa penyediaan dana hibah Pemilukada wajib dianggarkan tahun 2023 sebesar 40% dari total besaran dana hibah yang disepakati.

"Hal ini juga telah didukung dengan Perubahan Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024," katanya.

Secara regulasi, lanjut Adhy, perbedaan antara KUA PPAS dengan Nota Keuangan diperbolehkan berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 94. Yakni bila terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.

Juru bicara fraksi Partai Gerindra, Rohani Siswato mengatakan pernyataan Bapak Sekdaprov Jatim bahwa tidak ada perbedaan antara rancangan perubahan KUA PPAS P-APBD 2023 dengan nota keuangan rancangan Perda Perubahan APBD 2023 dan menyebut hal tersebut sebagai perbedaan penafsiran didalam memahami postur anggaran antara Badan Anggaran dengan TAPD adalah sebuah kenafian di dalam berfikir. Dia menandakan bahwa faktanya angka belanja berubah dari rancangan KUA PPAS Perubahan 2023 sebesar Rp 35.129.253.255.209 menjadi Rp 34.786.031.255.209 saat kesepakatan KUA PPAS Perubahan 2023 dan menjadi Rp 35.232.891.255.255.208 saat nota



Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Rohani Siswato saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam sidang paripurna, Selasa (12/9/2023).

"Pernyataan Bapak Sekdaprov Jatim bahwa adanya selisih belanja antara kesepakatan rancangan Perubahan KUA PPAS P-APBD 2023 dengan Rancangan perubahan APBD 2023, karena pada saat nota keuangan terjadi pergeseran anggaran, yang awalnya berada pada pos pembiayaan digeser ke pos belanja, di mana kemudian menjadi dasar yang menyatakan bahwa nota dan pendapat Banggar layak dilanjutkan untuk dibahas ke tingkatan komisi, tidak dapat dibenarkan,"

keuangan.

"Pernyataan Bapak Sekdaprov Jatim bahwa adanya selisih belanja antara kesepakatan rancangan perubahan KUA PPAS P-APBD 2023 dengan Rancangan perubahan APBD 2023, karena pada saat nota keuangan terjadi pergeseran anggaran, yang awalnya berada pada pos pembiayaan digeser ke pos belanja, di mana kemudian menjadi dasar yang menyatakan bahwa nota dan pendapat Banggar layak dilanjutkan untuk dibahas ke tingkatan komisi, tidak dapat dibenarkan," tandasnya, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 170 PP 12/2019 bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS menjadi pedoman perangkat daerah dalam Menyusun RKA SKPD. Tapi, pergeseran tersebut telah menyebabkan perubahan angka pada semua pos belanja, baik belanja operasional, belanja modal, belanja, tidak terduga maupun belanja transfer.

Menurutnya, pergeseran secara sepihak yang dilakukan oleh TAPD tidak saja mencederai norma yang ada, tetapi juga secara etika hubungan antara legislative dan eksekutif. Sebab, sejatinya perubahan ataupun pergeseran anggaran yang ada di APBD, seharusnya dilakukan melalui proses pembahasan bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran.

"Jangan sampai DPRD hanya dijadikan 'tukang stempel' untuk melegitimasi perubahan atau pergeseran secara sepihak yang dilakukan oleh TAPD, jangan sampai hal tersebut menjadi hal yang lumrah dilakukan, sehingga berpotensi memunculkan adanya 'anggaran siluman' atau 'kesepakatan setengah kamar' di luar pembahasan yang

semestinya," tandasnya.

Dia juga mengatakan bahwa pernyataan Sekdaprov Jatim bahwa pergeseran yang dinilai secara sepihak ini disebabkan karena mengikuti peraturan perundang-undangan, baik ketentuan Pasal 78 PP 12 tahun 2019, SE Kemendagri Nomor 900.1.9.2/435/SJ tentang pendanaan pemilukada serta perda nomor 6 tahun 2022 tentang dana cadangan tidaklah tepat disampaikan sebagai landasan pembenaran. Menurutnya, menjadi persoalan sebenarnya bukanlah pada dasar hukumnya, tetapi caranya, mengapa usulan pergeseran tersebut tidak dilakukan melalui proses pembahasan bersama antara Banggar dan TAPD.

"Pernyataan Bapak Sekdaprov Jatim bahwa secara regulasi perbedaan antara KUA PPAS dengan nota keuangan diperbolehkan berdasarkan Pasal 94 PP 12 tahun 2019, menurut pandangan kami tidaklah tepat digunakan pada kondisi yang terjadi saat ini. Mengingat Pasal 94 tersebut adalah landasan yang seharusnya dipergunakan untuk pengeluaran ke-daruratan/ mendesak, bukan perencanaan yang sangat bisa diprediksi sebelumnya, secara jelas dan tegas, batasan kriteria mendesak sudah diatur pada pasal 69 ayat 2 PP 12/2019. Kalau boleh kami ibaratkan melalui pantun 'Ke Madiun naik becak, Mohon maaf Pak Sekda, norma yang panjenengan gunakan, tidak nyambung Pak,'" katanya.

Namun demikian, dia menandakan bahwa pemikiran kritis tersebut adalah bentuk cinta kepada Jawa Timur. Fraksi Gerindra berkomitmen menjaga dan mengawal Khofifah Indar Parawansa agar senantiasa bekerja berdasarkan kaidah yang diatur menurut norma perundang-undangan. (lut/dya)

A close-up portrait of Laura Basuki, a woman with dark hair, smiling warmly. She is wearing a dark blazer and a small hoop earring. The background is dark, making her face the central focus.

# LAURA BASUKI

• **NAIK KRL** •

*Foto-foto : Istimewa*



**AKTRIS** Laura Basuki (35) kembali hadir di layar lebar sebagai karakter utama dalam film *Sleep Call* (2023). Film bergenre thriller ini bercerita tentang kehidupan seorang perempuan kesepian di kota besar yang bekerja sebagai penagih utang.

"Skenario film ini cukup rumit. Bisa dibbilang peran paling rumit yang pernah aku kerjakan, tetapi justru dari peran ini mengingatkan aku kembali betapa cintanya aku pada seni peran. Aku benar-benar mencintai proses pembuatan film ini," kata Laura dalam, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Beruntung, suasana produksi film yang nyaman dan aman membantu Laura berakting tanpa kendala.

Karena bercerita tentang pekerja urban, lokasi pengambilan gambar ini berlangsung di kawasan Jabodetabek, termasuk di stasiun KRL.

Dalam salah satu adegan, terlihat karakter Laura yang bernama Dina menaiki KRL dari Stasiun Karet, Tanah Abang, untuk berangkat kerja. Laura harus berdiri berdesak-desakan di antara penumpang lain.

"Sebenarnya ini bukan pertama kali aku naik KRL. Aku sudah pernah naik KRL. Tetapi, ini jadi menyenangkan karena kita juga

didukung oleh PT KAI," ujar peraih Piala Citra ini.

Laura menceritakan, tim *Sleep Call* memilih waktu shooting di KRL sesuai jam kerja saat pergi dan pulang kerja. "Ketika pulang larut malam gerbongnya lebih sepi. Jadi, kita mencari jam-jam yang disesuaikan dengan skenario," kata Laura.

**Profil Laura Basuki**

Dunia model menjadi bekal Laura Basuki terjun ke dunia hiburan. Namanya pun populer di layar lebar.

Laura Basuki atau yang biasa disapa Laura ini merupakan model dan juga aktris kelahiran Jerman, 9 Januari 1988. Ia anak dari pasangan Wibowo Basuki dan Thi Kieu Tien.

Laura memang telah menggeluti dunia model ketika masih sekolah dengan mengikuti sekolah modeling saat liburan sekolah.

Mengawali kariernya sebagai model, membuatnya mendapatkan tawaran untuk kasting sebuah film. Gara-gara *Bola* adalah film pertamanya yang ia bintang tahun 2008.

Setelah film pertamanya, ia mulai dikenal banyak orang ketika

membintangi film selanjutnya *3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta* yang rilis pada 2010. Di film itu, ia beradu akting dengan Reza Rahadian dan Arumi Bachsin. Namanya mulai populer lewat film ini saat usianya 22 tahun.

Film lain yang ia bintang di antaranya *Republik Twitter*, *Di Timur Matahari*, *Madre*, *Haji Backpacker*, *Love and Faith* dan *The Returning*.

Bakat beraktingnya tak perlu diragukan lagi, namanya sering masuk nominasi dan tak jarang mendapatkan penghargaan dari berbagai ajang festival. Ia pernah diganjar sebagai *Pendatang Baru Wanita Terbaik*, *Pendatang Baru Wanita Terfavorit* dan *Pemeran Utama Wanita Terbaik*.

Laura juga pernah menjadi model video klip beberapa band Indonesia,

sebut saja Nidji, *The Titans*, *T-Five* dan *Lyla*.

Dalam kehidupan pribadinya, Laura menikah dengan Leo Satrya Sandjaja di Jakarta, 25 Juni 2011. Ia memilih nikah muda saat usianya 23 tahun dengan perbedaan usia 11 tahun dengan suaminya.

Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Owen Sandjaja, setelah kurang lebih lima tahun menikah (*Kompas-berbagai sumber*)



"Skenario film ini cukup rumit. Bisa dibbilang peran paling rumit yang pernah aku kerjakan, tetapi justru dari peran ini mengingatkan aku kembali betapa cintanya aku pada seni peran. Aku benar-benar mencintai proses pembuatan film ini,"

**Laura Basuki (Aktris)**

# 10 MANFAAT KOLANG KALING UNTUK KOLESTEROL

**KOLANG** kaling atau buah atap adalah camilan yang terbuat dari biji pohon aren. Kolang-kaling memiliki bentuk lonjong, dengan warna putih yang transparan. Saat digigit, teksturnya kenyal dan mudah dicerna.

Kolang-kaling bisa diolah menjadi minuman yang menyegarkan atau menghangatkan tubuh.

Cara membuat kolang-kaling adalah dengan membakar buah aren sampai hangus, lalu bijinya direbus sampai empuk.

Kemudian direndam selama beberapa hari dengan larutan air kapur, diambil bijinya untuk direbus selama beberapa jam.

Biji yang sudah direbus tersebut kemudian direndam dengan larutan air kapur selama beberapa hari sehingga terfermentasikan.

Kolang-kaling bisa disajikan dengan santan, sirup atau jahe dengan rasa yang menggugah selera.

Rutin mengonsumsi kolang-kaling bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama turunkan kolesterol.

Berikut manfaat kolang-kaling untuk kesehatan, yang ampuh menurunkan kolesterol. Cari tahu juga cara membuatnya:

## 1. Melancarkan Sistem Pencernaan

Manfaat mengonsumsi kolang-kaling yang pertama, yaitu bisa membantu melancarkan sistem pencernaan, karena kolang-kaling memiliki kandungan 1,6 gram serat kasar per 100 gram.

Serat kasar dalam kolang-kaling ini tidak larut dalam air, sehingga bisa mengatasi penyakit sembelit.

## 2. Mencegah Osteoporosis

Kolang-kaling bagus dikonsumsi orang yang sudah lanjut usia. Karena kolang-kaling memiliki kandungan 91 kalsium dan 243 fosfor per 100 gram. Kandungan tersebut bisa menguatkan masa tulang agar tidak mudah keropos.

## 3. Mencegah Dehidrasi

Kolang-kaling sering dikonsumsi pada saat buka puasa, karena kolang-kaling bisa membantu menghidrasi tubuh yang dehidrasi setelah seharian berpuasa. Hal ini disebabkan karena

kolang-kaling memiliki kandungan kadar air yang tinggi, vitamin dan juga mineral.

## 4. Baik untuk Diet

Mengonsumsi kolang-kaling sangat bermanfaat untuk orang yang sedang diet. Karena kandungan protein, karbohidrat, serat kasar dan kadar abu di dalam kolang-kaling, bisa membantu perut agar tidak mudah lapar.

## 5. Mengobati Peradangan Sendi

Kolang-kaling memiliki sifat sebagai antianalgesik, yang bisa digunakan untuk mengobati peradangan sendi.

Untuk mengobati peradangan sendi ini, konsumsi kolang-kaling tanpa gula dan pewarna sebanyak 100 gram perhari.

## 6. Menurunkan Kolesterol

Kolang kaling mengandung serat makanan yang baik untuk kesehatan pencernaan. Serat dapat membantu mengikat kolesterol berlebih dalam tubuh dan membuangnya melalui buang air besar.

Ini dapat membantu mengurangi jumlah kolesterol LDL (kolesterol jahat) dalam darah

## 8. Meredakan Nyeri Haid

Kolang kaling mempunyai manfaat khusus bagi kam hawa. Senyawa yang ada dalam akar arennya sering digunakan sebagai peluruh haid.

## 9. Meredakan Panas Dalam

Ada manfaat lain yang didapat dari banyaknya kandungan air dari kolang-kaling. Menurut ahli nutrisi Leona Victoria Djajadi, MND, kolang-kaling bisa bermanfaat untuk redakan panas dalam.

## 10. Mencegah Penuaan Dini

Kolang kaling merupakan buah yang kaya antioksidan. Menurut beberapa studi, buah ini memiliki efek untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Antioksidan dalam kolang-kaling menjaga sel tubuh agar tidak rusak akibat radikal bebas.

**Inilah beberapa manfaat yang dimiliki kolang-kaling. Semoga bermanfaat. (Fimela)**





# APAKAH CUACA PANAS BISA MEMBUAT ORANG CEPAT MARAH?

**BEBERAPA** dari Anda mungkin pernah memperhatikan, orang bisa menjadi lebih agresif saat mereka kepanasan.

Penelitian selama puluhan tahun juga menunjukkan cuaca panas yang ekstrem dikaitkan dengan perang saudara dan kekerasan pribadi.

Meski terdapat temuan yang konsisten, masih terdapat kontroversi mengenai mengapa cuaca panas dan kekerasan terjadi bersamaan.

Kini sebuah studi baru berusaha kembali mengurai tentang bagaimana cuaca panas bisa memengaruhi emosi orang. Hubungan cuaca panas dan agresivitas Dikutip dari Live Science, Jumat (8/9/2023) studi baru ini menunjukkan, suhu panas membuat beberapa orang menjadi lebih agresif, tetapi hanya jika mereka merasa terpinggirkan.

Sementara itu, cuaca panas tidak secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat.

"Mengingat perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia yang diikuti dengan perubahan suhu, kami merasa ini adalah studi yang penting," kata Robert Pickmans, mahasiswa doktoral di Universitas California, Berkeley.

Banyak penelitian sebelumnya mengenai efek psikologis dari cuaca panas dilakukan dengan menggunakan ukuran sampel yang kecil dan terbatas. Akan tetapi dalam studi baru ini, tim merekrut sekitar 900 peserta dari Berkeley, California dan 1000 orang dari Nairobi, Kenya.

Para sukarelawan dibawa ke ruangan bersuhu 22 derajat Celsius atau ruangan bersuhu 30 derajat Celsius dan menjalani serangkaian tes pengambilan keputusan, serta kognitif standar.

Para peneliti kemudian membandingkan kinerja individu di ruangan sejuk dan panas.

## Hasil studi cuaca panas dan emosi

Temuan pertama dari studi ini adalah secara umum, tidak terdapat banyak perbedaan. Orang-orang di ruangan yang panas mengeluh merasa lebih mengantuk, tetapi kemampuan mengambil keputusan mereka tidak menurun.

Kendati demikian, ada hasil yang menarik dalam satu tugas yang disebut tugas 'kegembiraan kehancuran'.

Dalam tes ini peserta mendapat kesempatan untuk menghapus sebagian tabungan peserta lain. Tidak ada manfaat atau risiko besar dalam melakukan tugas tersebut.

Mereka tidak mendapatkan imbalan uang apa pun. Peserta lain juga tidak akan tahu berapa banyak yang dipilih untuk dihapus tabungannya.

"Tugas ini merupakan ukuran standar agresi," kata Pickmans.

Panas tidak mempengaruhi cara orang memainkan permainan "kegembiraan kehancuran" di Berkeley, namun di Nairobi, peserta di ruangan yang lebih panas merasakan dampaknya.

Setelah diteliti lebih lanjut, peneliti menemukan dampak agresi itu muncul pada partisipan yang berasal dari kelompok etnis yang terpinggirkan dalam pemilu.

"Kami pikir ini cukup menarik. Terutama mengingat literatur iklim yang mendokumentasikan hubungan antara suhu dan kekerasan politik," papar Pickmans.

Namun ia mengingatkan bahwa hasil ini merupakan eksplorasi karena peneliti tidak melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat perbedaan antar kelompok etnis. (Kompas)

HARIAN

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

**MEDIA TERVERIFIKASI**


**BIRO : SURABAYA:** LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO :** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN :** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK :** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI) :** IMAN SANTOSO, | **MADIUN :** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR :** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK :** ANGGA PRAYOGA

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# TIPS – TIPS

## MERAWAT SNEAKER

**PENCINTA** sepatu sneaker tentunya rela merogoh biaya demi mendapatkan sneaker impian. Sneaker memberikan kenyamanan tersendiri bagi mereka yang sering beraktivitas aktif diluar rumah.

Sepatu kets yang satu ini menarik perhatian banyak orang untuk dimiliki dan sangat mudah untuk ditemukan dengan harga yang beragam. Simak tips merawat sneaker :

### 1. Memberikan Perhatian

Yang terpenting, cara termudah untuk merawat sepatu adalah dengan mencegah noda atau kerutan sejak awal.

### 2. Isi Dengan Koran yang Sudah Dikerutkan

Setelah Dipakai Surat kabar mudah diakses dan sangat baik dalam menyerap kelembapan. Jika kamu kamu berkeringat atau sepatu kamu lembab karena terkena hujan atau air, isilah sepatu tersebut dengan koran untuk membantunya lebih cepat kering dan mengurangi bau yang tidak sedap.

Mengisi sepatu dengan koran juga akan membantu mencegah kusutnya sepatu yang membuat sepatu terlihat tua.

### 3. Simpan dengan Benar

Menyimpan sepatu dalam kotak sepatu tidak menjamin sepatu disimpan dengan tepat. Kamu bisa menambahkan lembaran pengering ke dalam sepatu agar tetap segar atau bisa membeli produk yang dibuat khusus untuk mengurangi bau sepatu.

### 4. Jangan Terlalu Sering Menggunakan Sepatu

Jika kamu sudah menggunakan sepatu selama beberapa hari berturut-turut, maka ganti sepatu kamu. Hal ini bermanfaat agar sepatu bisa lebih awet dan terawat. Digunakan setiap hari berturut-turut akan membuat bahan sepatu mudah rusak dan kusam.

### 5. Jangan Menggunakan Mesin Cuci

Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pecinta sepatu sneaker adalah membuang sepatunya ke dalam mesin cuci. Perlu diingat bahwa sebagian besar jenis sepatu terbuat dari bahan yang tidak tahan terhadap mesin cuci. Misalnya saja sepatu kulit cenderung menyusut atau meregang jika dicuci dengan mesin cuci, sedangkan sepatu berbahan suede dapat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Cara terbaik merawat sepatu kets adalah mencucinya dengan tangan. Ini juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan bau kaki dan bau tidak sedap lainnya dari sepatu kets. Penting

juga untuk diperhatikan bahwa harus menggunakan air dingin, deterjen lembut dan pakaian lembut saat membersihkan sepatu.

### 6. Perhatikan Cara Menyikat Sepatu dengan Benar

Menyikat adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan untuk merawat sepatu kets. Ini tidak hanya membantu menghilangkan kotoran dan debu tetapi juga menjaga sepatu terlihat segar dan rapi.

### 7. Perhatikan Tali Sepatu

Tali sepatu sama pentingnya dengan sepatu kets itu sendiri. Mencuci tali sepatu hanya dengan merendamnya dalam semangkuk air hangat yang dicampur dengan deterjen atau dapat membeli sepasang baru dengan warna dan pola berbeda untuk mengubah tampilan (Bisnis)



## Diduga Tahanan .... (dari hal 1)

**DEWAN** Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya menerima laporan dugaan pertemuan antara tahanan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung dan Pimpinan KPK. Laporan ini masuk ke tangan mereka pada pekan lalu.

"(Terima laporannya, red) dua hari lalu, tiga hari lalu," kata Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Albertina belum mau memerinci siapa pimpinan yang bertemu dengan tahanan itu. Dia hanya mengatakan pelaporan itu sedang ditelaah. "Ya, suratnya sudah diterima Dewas KPK. Jadi dalam proses ya," tegasnya.

Diketahui, tahanan diduga ada di lantai Pimpinan KPK pada Jumat Juli lalu. Tindakan tahanan tersebut disebut belum pernah terjadi selama Gedung Merah Putih berdiri. Saktinya lagi, tahanan ini diduga naik ke lantai 15 tanpa rompi tahanan berwarna oranye dan tangan tak terborgol. Lazimnya seorang tersangka. Menurut informasi yang didapatkan, tahanan ini berada sekitar 30 menit di lantai tersebut.

Diduga, tahanan ini adalah Dadan Tri Yudianto. Ia adalah salah satu tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Dadan dijerat tersangka karena diduga sebagai penghubung suap Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Belum diketahui tujuan Dadan ke lantai 15 dan apakah benar bertemu dengan salah satu pimpinan KPK atau tidak.

Diketahui, Dadan Tri Yudianto (tengah) menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menjadi perantara suap atau makelar kasus tindak pidana suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan, penuntutan, dan fakta hukum di persidangan Hakim Agung Gazalba Saleh dan terdakwa lainnya. Gazalba Saleh merupakan hakim agung yang diduga menerima suap dari pengacara debutur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka, Theodorus Yosep Parera melalui jalur bawah. Suap diberikan agar Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandhi Suparman dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam putusan kasasi pidananya di MA.

Selain menyuap melalui bawah, Tanaka juga mengondisikan persidangan itu melalui Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Untuk jalur ini, Tanaka jembatani oleh Dadan Tri Yudianto dengan imbalan sejumlah uang. Tanaka pun membayar suap Rp 11,2 miliar dalam tujuh kali transfer kepada Dadan Tri Yudianto. Sejauh ini, KPK baru menemukan bukti awal Hasbi Hasan menerima bagian Rp 3 miliar.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah tahanan itu bertemu pimpinan serta siapa pimpinan yang dimaksud. Bila pun benar, ada aturan di KPK yang

menyatakan bahwa Pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai kasus itu mudah untuk dibongkar. Yudi mengatakan peran Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga sentral dalam kasus ini. Dia mengatakan Dewas harus bersikap proaktif.

Langkah tercepat yang harus dilakukan Dewas dalam membongkar isu pertemuan itu ialah lewat pemeriksaan CCTV. Dewas KPK, menurut Yudi, harus segera memeriksa CCTV yang berada di lantai 15 gedung Merah Putih KPK.

"Dewas harus proaktif. Untuk mencari kebenaran berita itu, mudah saja, tinggal cek CCTV," katanya.

Yudi menambahkan, Dewas KPK juga harus memeriksa pegawai rutan hingga pimpinan KPK untuk membuat terang kabar tersebut.

"Periksa pegawai rutan, penyidik, pimpinan KPK atau pegawai lain yang dianggap tahu terkait isu itu ada atau tidak peristiwanya. Termasuk tahanan yang diduga ke lantai 15 juga dikonfirmasi," katanya.

### KPK Mengelak

Wakil Ketua Alexander Marwata membantah ada Pimpinan yang bertemu tahanan. "Yang jelas tidak ada pimpinan yang menemui atau bertemu dengan tahanan di lantai 15," kata Alex saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023).

Namun, ia belum menanggapi saat dikonfirmasi kebenaran adanya seorang tahanan di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Lantai tersebut ialah ruang kerja Pimpinan KPK.

Secara terpisah, Plt juru bicara KPK Ali Fikri juga tidak membantah maupun tidak membenarkan dugaan tersebut. Dia hanya menjawab normatif dengan mengatakan, bahwa pemeriksaan tersangka biasanya dilakukan di lantai 2 Gedung Merah Putih, bukan lantai 15.

"Ini informasi dari teman-teman [jurnalis] sendiri ya. Maksud saya, kami hanya bisa menjelaskan sejauh ini dalam pemeriksaan setiap tahanan dalam kapasitasnya sebagai tersangka ataupun saksi selalu dilakukan di lantai dua," kata Ali.

"Saya hanya ingin sampaikan setiap pemeriksaan tersangka itu yang kami tahu di lantai dua," tegas Ali ketika dicecar awak media.

Diketahui, saat ini yang duduk di kursi Ketua KPK adalah Posisi Ketua KPK kali ini diisi oleh sosok yang berasal dari kepolisian, Firli Bahuri. Dia adalah satu-satunya calon dengan latar belakang polisi yang berhasil bertahan dan masuk menjadi Pimpinan KPK.

Kemudian ada Nurul Gufron. Di antara semua nama yang ada, Gufron adalah satu-satunya yang memiliki latar belakang sebagai akademisi. Dia adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya, orang yang menjabat sebagai Petinggi KPK adalah seorang Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Ia adalah Nawawi Pomolango. Selain di Denpasar, ia sudah pernah menjadi Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia juga tercatat pernah menangani kasus suap pengaturan kuota impor sapi dan pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Pimpinan KPK merupakan satu-satunya petahana dan kembali menjabat adalah Alexander Marwata. Dia sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Pria kelahiran Klaten, 26 Februari 1967 ini merupakan lulusan D4 Jurusan Akuntansi STAN dan S1 Ilmu Hukum UI. Ia banyak meniti karier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sejak 1987-2011. Selain itu, Alexander juga memiliki pengalaman sebagai Hakim di PN Jakarta Pusat.

Sementara, Wakil Ketua KPK terpilih pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Johanis Tanak, mempunyai harta kekayaan senilai total Rp8,9 miliar. Johanis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1983. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga hingga mendapatkan Gelar Doktor Program Studi Ilmu Hukum pada Juni 2019. Johanis sebelumnya dikenal sebagai pejabat karier di lingkungan Kejaksaan.

Diketahui, saat inipun Johanis Tanak tersangkut kasus chat dengan Idris Froyoto Sihite. Dewas menemukan adanya komunikasi lain antara Johanis dengan Sihite yang terjadi pada 27 Maret 2023. Percakapan itu terjadi bersamaan dengan kegiatan pengeledahan kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.

Kinerja KPK terus menjadi sorotan. Padahal, Presiden Joko Widodo baru saja memberikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan KPK. Tukin tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang ditandatangani pada 14 Agustus 2023.

"Pegawai di Lingkungan KPK, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan," demikian bunyi Pasal 2 Ayat 1 dalam perpres tersebut.

Lebih lanjut, pada Ayat 2 pasal yang sama, disebutkan bahwa tukin diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Tukin tersebut tidak diberikan kepada pegawai KPK yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara atau dinonaktifkan, serta diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai.

Selain itu, tukin juga tidak diberikan kepada pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. Adapun pemberian tukin kepada pegawai KPK dibedakan berdasarkan kelas jabatannya. Setidaknya ada 17 kelas jabatan di lingkungan KPK. Tukin paling rendah adalah kelas jabatan 1

sebesar Rp2,5 juta per bulannya. Sementara yang tertinggi adalah kelas jabatan 17 yang mendapatkan tukin sebesar Rp33,2 juta. (wid,rls,ist,ant/dya)

## BESARAN TUKIN PEGAWAI KPK BERDASARKAN KELAS JABATAN YANG DITETAPKAN DALAM PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2023:

● Kelas Jabatan 17:  
**Rp33.240.000**

● Kelas Jabatan 16:  
**Rp27.577.500**

● Kelas Jabatan 15:  
**Rp19.280.000**

● Kelas Jabatan 14:  
**Rp17.064.000**

● Kelas Jabatan 13:  
**Rp10.936.000**

● Kelas Jabatan 12:  
**Rp9.896.000**

● Kelas Jabatan 11:  
**Rp8.757.600**

● Kelas Jabatan 10:  
**Rp5.979.200**

● Kelas Jabatan 9:  
**Rp5.079.200**

● Kelas Jabatan 8:  
**Rp4.565.150**

● Kelas Jabatan 7:  
**Rp3.915.950**

● Kelas Jabatan 6:  
**Rp3.510.400**

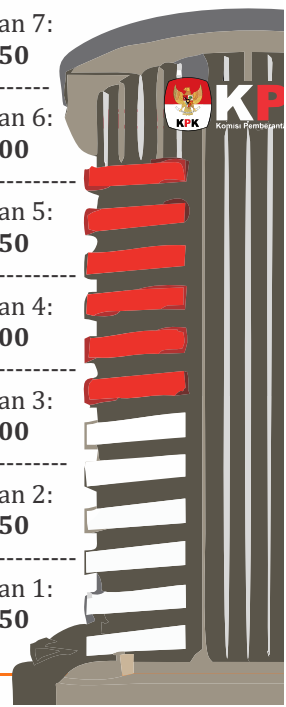
● Kelas Jabatan 5:  
**Rp3.134.250**

● Kelas Jabatan 4:  
**Rp2.985.000**

● Kelas Jabatan 3:  
**Rp2.898.000**

● Kelas Jabatan 2:  
**Rp2.708.250**

● Kelas Jabatan 1:  
**Rp2.531.250**





# DPRD JATIM SOROTI KINERJA DAN URGENSI PENYERTAAN MODAL BUMD

**SURABAYA** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur tengah melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023. Salah satu yang menjadi sorotan DPRD Jatim adalah urgensi penyertaan modal dan kinerja beberapa BUMD.

Saat sidang paripurna tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang P-APBD tahun anggaran 2023, Selasa (12/9/2023), Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Adam Rusydi menandakan bahwa dari sisi pendapatan daerah terjadi penyesuaian, pengembangan, dan peningkatan terhadap berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi dengan perbaikan layanan untuk mampu meningkatkan penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut, Rusydi menandakan bahwa pendapatan daerah mengalami perubahan, dari Rp29,848 triliun bertambah menjadi Rp31,322 triliun atau ada penambahan Rp 1,473 triliun. Penambahan ini diantaranya terjadi pada sector PAD Rp 1,472 triliun yang diperoleh dari meningkatnya hasil pajak dan retribusi 11,57% serta dari pendapatan lain yang sah Rp318,9 milyar lebih (12,30%).

Tetapi ada penurunan pada penerimaan pengelolaan kekayaan daerah atau pada BUMD sebesar Rp 395,07 milyar lebih atau berkurang 0,09% dari target pada APBD murni Rp 458,147 milyar lebih. Kemudian dari lain lain pendapatan daerah yang sah, bertambah Rp 1,071 milyar lebih menjadi Rp 28,204 milyar lebih.

Sementara, dari kontruksi belanja daerah direncanakan mencapai Rp 35,232 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran. Berdasar tema P-APBD Tahun Anggaran 2023 ditentukan arah kebijakan belanja daerah tetap pada 7 fokus sebagaimana konsepsi pada APBD (murni), yang diimplemetasikan melalui 93 program kegiatan menurut klasifikasi, dengan prosentase terhadap total belanja antara lain: a. Belanja Operasi Rp 22.242.045.512.284,00 (63,13%); b. Belanja Modal Rp 2.913.181.559.795,00 (8,27%); Belanja Tak Duga Rp 463.506.719.699,00 (1,31 %); d. Belanja Transfer 9.614.157.463.430,00 (27,27%).

Dari belanja daerah itu diketahui ada tambahan investasi daerah untuk penyertaan modal di PT Bangun Askrida dan PT Air Bersih; sedangkan



Penyerahan pemandangan umum dari Fraksi Partai Nasdem oleh juru bicara M Ashari pada pimpinan sidang paripurna DPRD Jatim, Selasa (12/9/2023)

bayar pokok hutang ke PT SMI untuk program PEN Rp 9,176 milyar.

"Pada komposisi Pembiayaan P-APBD ada alokasi menambah penyertaan modal untuk PT PDAM sebesar Rp 93,222 milyar sehingga menjadi Rp 123,333 milyar rupiah. Mohon penjelasan urgensi dan penggunaannya," tandas Adam.

Sorotan terhadap BUMD juga disampaikan fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Martin Hamonangan. Dia mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mencatat dari tahun ke tahun kinerja BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Timur mayoritas tidak menunjukkan kinerja yang mengembirakan dan bahkan terus-menerus membutuhkan tambahan dana penyertaan dalam jumlah

besar. Bahkan pada Rancangan Peraturan daerah Perubahan APBD TA 2023 ini dianggarkan pada Pos Belanja penyertaan modal untuk PT BPR Jatim sebesar Rp 200 milyar dan untuk PT Askrida sebesar Rp 46,86 milyar.

"Berdasarkan nilai modal yang telah disetor dibandingkan dengan nilai kepemilikan saat ini tampak tidak impresif dan masih dimungkinkan untuk upaya perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD.

Khusus PT Askrida malah menunjukkan kepemilikan saham daerah jauh lebih rendah dibanding tambahan modal disetor," tandasnya.

Bahkan dia menandakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpotensi tidak dikelola secara

profesional dan oleh karenanya terindikasi tidak memberikan hasil pengelolaan yang optimal. "Merujuk pada seluruh temuan dan analisis tersebut di atas, Fraksi PDI Perjuangan mendorong eksekutif untuk meninjau kembali apakah kapabilitas dewan direksi dan dewan komisaris masih dianggap layak dan kompeten untuk mengelola BUMD tersebut," tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta supaya pemprov segera meninjau atau menguji kembali (review) model bisnis dan perencanaan strategik masing-masing BUMD. Hal itu dilakukan untuk penyehatan organisasi usaha serta membuka opsi dilakukannya langkah-langkah strategik yang dianggap perlu seperti penguatan rentang kendali, mengurangi semangat untuk terus mengembangkan unit usaha dalam bentuk BUMD baru, dan pengurangan jumlah unit usaha melalui mekanisme penggabungan usaha (merger).

"Dan oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif agar elemen pengelolaan kekayaan

daerah sebagaimana tersebut di atas dapat segera ditangani sehingga upaya Eksekutif untuk memperbaiki postur penerimaan pendapatan daerah dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya pemulihan ekonomi akibat tekanan dinamika perekonomian global dan nasional," tegasnya.

Fraksi PAN, yang disampaikan Agung Supriyanto juga menyoroti kinerja BUMD yang tidak memberikan peningkatan pendapatan. Dia

menandakan dalam nota keuangan Gubernur, Fraksi PAN tidak menemukan adanya peningkatan pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni dari BUMD.

"Padahal dalam nota keuangan hal 47 disebutkan Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Mohon penjelasan mengenai hal ini?" kata Agung.

Rohani Siswanto, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, merujuk pada pengantar nota keuangan maupun dalam nota keuangan tidak ditemukan keterlibatan BUMD. "Mengingat peran BUMD pada tahun anggaran 2022 sangat kurang, untuk itu kami perlu penjelasan bagaimana peran BUMD dalam proyeksi perubahan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan semester 1 dan prognosis semester berikutnya," tegasnya.

Sementara, Fraksi Partai Nasdem, melalui juru bicaranya M Ashari menandakan bahwa secara umum mamahami beratnya tantangan yang dihadapi pemerintah untuk menghimpun pendapatan daerah. Untuk itu, dia menilai bahwa inovasi pelayanan menjadi factor kunci dari keberhasilan selama ini dalam pencapaian target peningkatan pajak daerah.

"Hanya saja, dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari laba atas penyertaan modal di BUMD, masih terus seperti suara kaset lama. Di luar BUMD kelompok bank dan yang tidak menjalankan penugasan dengan pembatasan tarif untuk fungsi pelayanan seperti perusahaan air bersih, potret BUMD kita secara umum jauh dari kata memuaskan. Sudah fungsi pelayanannya untuk afirmasi rendah, setoran deviden juga payah. Kami sudah tidak bisa berkata apa," katanya.

Dia pun menandakan bahwa entitas dari BUMD milik Pemprov Jatim ini makin relevan dibicarakan karena akibat regulasi perimbangan keuangan daerah yang akan berlaku pada tahun 2025. Bahkan, jika dikalkulasikan bisa menurunkan PAD Jatim hingga Rp 5 triliun dari sector kendaraan bermotor. "Bagaimana pemerintah menyiapkan rancang bangun BUMD kita, lebih dulu kami menunggu konsolidasi serius pemerintah," tandasnya. (lut/dya/ADV)